

**PENGARUH PERUBAHAN SISA LEBIH ANGGARAN DAN PERUBAHAN  
DANA BAGI HASIL TERHADAP PERUBAHAN BELANJA MODAL  
( Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi  
Aceh Tahun 2013-2015)**

**IMPACT OF THE UNSPENT FUND (SiLPA) AND CHANGES IN PROFIT  
SHARING FUND (DBH) TOWARD CAPITAL EXPENDITURE**

(Study at the Public Works Department of the Regency/City of Aceh  
Province in 2013-2015)

**Isra Maulina**

Prodi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala  
[isramaulina17@gmail.com](mailto:isramaulina17@gmail.com)

**Fathul Liza**

Mahasiswa Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN  
Lhokseumawe

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of changes in the unspent budget fund (SiLPA) and changes in profit sharing fund (DBH) to changes in capital expenditure in the district government of public works offices. The study was conducted on 23 district / city governments in Aceh during the period of 2013-2015. The type of data used in this study is secondary data. The research was conducted by census with data analysis using multiple linear regression. The results show that changes in the unspent budget fund and changes in profit sharing fund simultaneously and partially affect the changes in capital expenditure in the district government public works office in Aceh. These results indicate that changes in capital expenditures in public works can occur due to changes in the unspent budget fund, and changes in profit sharing fund.*

*Keywords: Changes in the unspent budget fund, changes in profit sharing fund, districts / municipalities and changes in capital expenditures.*

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja keuangan daerah. Menurut Indraningrum (2011) Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan

penyelenggara pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Perubahan bentuk pemerintahan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu terjadinya perubahan struktur APBD daerah

Menurut Abdullah (2013) perubahan Anggaran mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda, bisa saja perilaku oportunistik para pembuat keputusan, namun tidak jarang memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah.

Menurut Marzalita, et.al (2014) perubahan anggaran mampu menawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi anggaran disaat kondisi yang tidak menentu. Selama periode ketidakpastian pendapatan dan pengeluaran, perubahan anggaran dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan. Perubahan anggaran yang terjadi di pemerintah didorong oleh permasalahan teknis, setiap daerah melakukan perubahan untuk menyelesaikan program dengan anggaran serta memenuhi kebutuhan manajemen. Terhadap situasi lingkungan yang berubah.

Berdasarkan laporan Dinas Keuangan Aceh (DKA) tahun 2012, 2013 dan 2014 alokasi rata-rata perubahan anggaran belanja daerah selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahun. Dimana anggaran Belanja Murni terhadap anggaran Belanja Modal setelah Perubahan yang dialokasikan pada tahun 2012 sebesar 2,10%, pada tahun 2013 sebesar 5,25%, dan pada tahun 2014 sebesar 3,20%. Begitu juga dengan perubahan Belanja Modal pada tahun 2015, ternyata setelah di dapatkan data dari Dinas Keuangan Aceh pada tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Aceh mengalami peningkatan yang signifikan dalam perubahan APBD. Seperti yang terlihat pada tabel 1 yang ada di 5 kabupaten/kota di Aceh:

**Tabel 1**  
**Selisih Kenaikan Anggaran Belanja Modal Dinas PU dalam APBD dan APBDP TA 2015**

No	Kabupaten/Kota	APBD	P-APBD	Selisih
1	Kota Banda Aceh	86.133.798.000	99.999.177.979	13.865.379.979
2	Kota Sabang	48.906.238.710	59.282.157.008	10.375.918.298
3	Kabupaten Aceh Besar	61.870.155.991	94.365.180.991	32.495.025.000
4	Kabupaten Pidie	97.474.165.202	202.245.975.158	104.771.809.956
5	Kabupaten Pidie Jaya	84.178.608.842	203.765.791.561	119.587.182.719
6	Kabupaten Bireuen	104.719.824.444	140.342.695.089	35.622.870.645
7	Kota Lhokseumawe	103.279.943.928	168.289.407.602	65.009.463.674

Sumber : Dinas Keuangan Aceh

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa peningkatan belanja modal dalam P-APBD sangat signifikan. Hal ini menunjukkan belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum selalu berubah. Perubahan anggaran belanja modal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh sumber dana untuk membiayai belanja modal yang mengalami peningkatan. Kondisi yang terjadi pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kegiatan yang didanai dari belanja modal biasanya direalisasikan pada akhir tahun anggaran yang penganggarnya berada dalam perubahan APBD.

Fenomena yang terjadi perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum direalisasikan dalam bentuk penambahan pekerjaan baru atau penambahan proyek. Seperti penambahan proyek baru pada tahun 2015 di anggaran perubahan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya di Kabupaten Gayo Lues yaitu program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kemudian program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. (Dinas Keuangan Aceh, Tahun 2015). Perubahan anggaran tersebut dapat menambah atau mengurangi anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas PU. Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan anggaran belanja modal dapat terjadi dalam keadaan luar biasa atau keadaan terpaksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan sisa lebih anggaran,

perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan belanja modal di dinas PUKabupaten/kota di Aceh.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemda dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan yang berorientasi pada kinerja. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana dimasa yang akan datang.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.

Menurut Rona (2016) Beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja modal berdasarkan penyebabnya adalah: 1. Perubahan karena adanya varian SiLPA. Perubahan harus dilakukan apabila prediksi atas SiLPA tidak akurat, yang bersumber dari adanya perbedaan antara SILPA 201a definitif setelah diaudit oleh BPK dengan SiLPA 201b; 2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi apabila dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah; 3. Perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari perspektif *agency theory*, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif (dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan dibawah potensi, lalu dilakukan "*adjustment*" pada saat dilakukan perubahan APBD.

### **2. Perubahan Sisa Lebih Anggaran ( SiLPA)**

Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup

pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: Menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan suatu efisiensi pemerintah, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar daripada komponen pembiayaan.

### 3. Perubahan Dana Bagi Hasil

Definisi Dana bagi hasil menurut Kuncoro (2014), “ Dana bagi hasil merupakan pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam dan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabuatennya.” Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam angka desentralisasi.

Menurut Abdullah (2013a) mengungkapkan ada beberapa kondisi yang menyebabkan sebab perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, yaitu karena (1) target pendapatan dianggarkan terlalu rendah dalam anggaran daerah atau APBD (*Underestimated*); (2) Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral *hazard* yang dilakukan *agency* yang dalam konteks pendapatan adalah budget *minimizer*; (3) Jika dalam APBD “murni” target PAD *underestimated*, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan uji hipotesis untuk melihat pengaruh sisa lebih anggaran dan perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh. Unit analisis menggunakan analisis kelompok yaitu 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh sebagai unit analisis dengan melakukan pengamatan terhadap data yang dikumpulkan dari dokumen APBD berupa data anggaran murni dan data anggaran perubahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Horizon waktu menggunakan data *pooling* yaitu kombinasi antara data runtut waktu (*time-series*) dan data silang tempat (*cross-section*), dimana perubahan sisa lebih anggaran, perubahan dana bagi hasil dan perubahan belanja modal periode tahun 2013–2015 sebagai *time series* dan 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebagai data *cross-section*.

Sumber data menggunakan data sekunder dari data dokumen APBD Kabupaten/Kota di Aceh. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan metode penelusuran melalui data *online*. Pengumpulan data dilakukan dengan mencermati data sisa lebih anggaran, dana bagi hasil, dan belanja modal dinas PU dalam dokumen APBD daerah yang telah mendapat pengesahan dari DPRK dan telah di Qanunkan serta studi pustaka berupa buku, jurnal, artikel dan peraturan- peraturan yang khususnya berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk melihat secara langsung pengaruh perubahan sisa lebih anggaran, perubahan dana bagi hasil, terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota, baik secara simultan maupun secara parsial.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

Data penelitian menunjukkan bahwa perubahan belanja modal di dinas PU dapat terjadi karena adanya perubahan sisa lebih anggaran, dan perubahan dana bagi hasil. Perubahan belanja modal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja modal yang ditargetkan dalam APBD. Hasil pengolahan data pengaruh perubahan sisa lebih anggaran, perubahan dana bagi hasil, terhadap perubahan belanja

modal di Dinas PU kabupaten/kota secara statistik didapatkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 26439,987 + 0,341X_1 + 0,050X_2 + \varepsilon$$

dimana Y adalah variabel perubahan belanja modal,  $X_1$  adalah variabel perubahan sisa lebih anggaran,  $X_2$  adalah variabel perubahan dana bagi hasil. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) didapatkan sebesar 0,143 yang menunjukkan bahwa perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan pendapatan asli daerah terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 14,3%.

### 1. Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisien tidak sama dengan nol, nilai  $\beta_i \neq 0$ , ( $i=1,2,3$ ), artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_{a1}$ . Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan dana bagi hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap perubahan belanja modal dinas PU kabupaten/kota di Aceh pada periode tahun 2013–2015.

Nilai R Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Nilai *R Square* sebesar 0,143 menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini, yaitu perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan dana bagi hasil berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu perubahan belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebesar 14,3%. Sisanya sebesar 85,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

### 2. Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial

Hasil pengujian hipotesis secara parsial atas kedua variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

#### a. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi perubahan sisa lebih anggaran tidak sama dengan nol, nilai  $\beta_1$  sebesar

0,341 ( $\beta_1 \neq 0$ ) dan hasilnya menyatakan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_{a2}$  diterima. Hal ini berarti perubahan sisa lebih anggaran berpengaruh secara parsial terhadap perubahan belanja modal. Nilai positif pada koefisien regresi variabel perubahan sisa lebih anggaran menunjukkan hubungan positif dengan variabel perubahan belanja modal. Kondisi ini bermakna semakin tinggi perubahan sisa lebih anggaran maka prediksi perubahan belanja modal akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian Ardhini (2011) dengan objek penelitian di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu pendanaan belanja modal.

b. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi perubahan dana bagi hasil tidak sama dengan nol dapat diketahui nilai  $\beta_3$  sebesar 0,050 ( $\beta_3 \neq 0$ ) dan hasilnya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_{a4}$ . Hal ini berarti perubahan dana bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap perubahan belanja modal. Nilai positif pada koefisien regresi variabel perubahan dana bagi hasil menunjukkan hubungan positif dengan variabel perubahan belanja modal. Hubungan positif tersebut bermakna bahwa perubahan dana bagi hasil sebanding dengan perubahan belanja modal yang terjadi pada pemerintah daerah. Kondisi ini bermakna semakin tinggi perubahan dana bagi hasil maka prediksi perubahan belanja modal akan semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan dana bagi hasil berhubungan positif dengan perubahan belanja modal yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2015.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan:

1. Secara simultan, variabel perubahan sisa lebih anggaran, dan perubahan dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh;

2. Secara parsial, variabel perubahan sisa lebih anggaran, perubahan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh.  
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah:
  1. agar menambah cakupan wilayah studi maupun menambah variabel lainnya, yang diperkirakan dapat mempengaruhi perubahan belanja modal.
  2. agar memperhatikan pengaruh faktor politik dalam penentuan anggaran pendapatan dan pengalokasian belanja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. (2013a). *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja*. Melalui: <https://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/perubahan-apbd.06/03/2016>.
- \_\_\_\_\_. (2013b). *Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja*. Melalui: <https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/.pengaruh-silpa-terhadap-belanja.06/03/2016>.
- Ardini. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan: Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indraningrum. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Marzalita, Nadirsyah dan Syukriy Abdullah. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah*. *Jurnal Magister Akuntansi*. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Rona, Riza. (2016). *Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.* Tesis. Banda Aceh: Unsyiah.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal.* *Accounting Analysis Journal.* Universitas Negeri Semarang.